

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Mareril dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Artidjo Alkotsar, *KorupsiPolitik di Negara Moderend*, FH UII Pers, Jakarta, 2015
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlini Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Frafika, Jakarta, 2016
- Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*, Cetakan Pertama, CV. Hikam Media Utama, Yogyakarta, 2020
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Fida Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2003

- Komisi Pembetansan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, 2006
- Konsideran Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption(UNCAC)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Laden Marpuang, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Koesnoe, *Resepsi Hukum Barat di Indonesia Dewasa Ini*, Varia Perad, 1997,
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017
- OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2007
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa*

- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007).
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Malang, Universitas Brawijaya
- R Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Seyadi, *BUMDes sebagai Alternative Lembaga Keuangan Desa*, UPPSTM YKPN, Yogyakarta, 2003
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sri Wulandari, *Teori Peranan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Tri Agung Kristanti, Editor. *Jangan Bunih KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*. Kompas, Jakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981

JURNAL

- Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No.2, 2018
- Edy Yusuf Agunggunanto, Dkk, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal JDEB*, Volume 13, Nomor 1, 2016
- Jabaruddin, “Penyagunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 3 Nomor 2*, Tahun 2023
- Mohammad Rifai dan Liavita Rahmawati, Konsitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, 2021
- Muhammad Rivai, dkk, Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Tumou Tou Law Review*, Volume 1 Nomor 2, 2022
- Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. , Nomor 5, 2022

WEBSITE

Aryo Putranto Saptohutomo, *ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>, Akses tanggal 20 Mei 2024

<http://kawaldesaku.blogspot.com/2016/01/pendirian-dan-pengelolaan-badan-usaha.html>, diakses pada tanggal 04 September 2023

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, Akses tanggal 17 Mei 2024

<https://antikorupsi.org/id/article/belajar-memberantas-korupsi-dari-cina-290704>, Akses tanggal 20 Mei 2024

<https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>, Akses tanggal 20 Mei 2024

<https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70865389/nah-duit-dikembalikan-penyelidikan-dugaan-korupsi-bumdes-perancak-dihentikan>, diakses pada tanggal 04 September 2023

<https://www.rri.go.id/jawa-tengah/anti-korupsi/349667/kejari-pati-tetapkan-tersangka-penyalahgunaan-penyertaan-modal-bumdesma>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

Tri Jata Ayu Pramesti, *cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc/>, diakses tanggal 02 September 2023.

Valerie Augustine Budianto, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*, Publish 26 April 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>, Akses tanggal 17 Mei 2024

Yulius Kaka, *Berantas Korupsi: Belajarlah dari China*, <https://kumparan.com/yulius-kaka/berantas-korupsi-belajarlah-dari-china/3>, Akses tanggal 20 Mei 2024